

LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN
INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI LAHAT**

**TRIWULAN I
JANUARI – MARET
TAHUN 2022**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN

SURVEI INDEKS KORUPSI TERHADAP PELAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI LAHAT

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di Lahat
Pada Hari, Selasa 5 April 2022



Ketua Pengadilan Negeri Lahat,
RENALDO MEIJI HASOLOAN TOBING, S.H., M.H.
NIP 19780508 200312 1 001

Ketua Tim Survei,


HERMAN
NIP. 19621221 198503 1002

DAFTAR ISI

Halaman Judul-----	i
Lembar Pengesahan-----	ii
Daftar Isi-----	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang -----	1
B. Maksud dan Tujuan -----	1
C. Landasan Hukum -----	2
D. Tahapan Pelaksanaan-----	3
E. Teknik Survei -----	3
BAB II METEDOLOGI	
A. Metode Penelitian-----	4
B. Populasi dan Sampel -----	4
C. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis-----	4
D. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control-----	4
E. Teknik Analisis Data -----	5
F. Tahapan Pelaksanaan-----	5
BAB III PERHITUNGAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI	
A. Indeks Total -----	8
B. Data Umum Responden -----	9
C. Data Domisili Responden-----	10
D. Data Umur Responden-----	11
E. Data Layanan -----	11
F. Nilai Per-Unsur -----	11
BAB IV HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN	
A. Hasil Penilaian Masing-Masing Ruang Lingkup-----	13
B. Evaluasi Nilai Unsur-----	16
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan-----	17
B. Rekomendasi -----	17
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi di Pengadilan Negeri Lahat didasarkan pada aturan dan ketentuan sebagaimana berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasindan Transaksi Elektronik;
- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- i) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- j) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2004 tentang Penyelegaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- l) SK KMA Republik Indonesia No. 026/KMA/SK/I/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- m) Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- n) Peraturan Menpan-RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menpan-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- o) Peraturan Menpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Evaluasi Pelaksanaan

- p) SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230/DJU/SIQHM.02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (Lentera), Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) di Lingkungan Peradilan Umum;
- q) SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Dibawahnya.
- r) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- s) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

D. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPA) di Pengadilan Negeri Lahat melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencangkup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun Instrumen Survei;
2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
3. Menetukan responden;
4. Melakukan survei;
5. Menyajikan dan melaporkan hasil;

E. Teknik Survei

Untuk melaksanakan survei, dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SISUPER dengan alamat: <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>

BAB II

METODOLOGI

A. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

C. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Lahat.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

D. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang disi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan melalui aplikasi survei elektronik SISUPER. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana

pengisian survei melalui perangkat vestouch interactive android kios di ruang PTSP Pengadilan Negeri Lahat, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

E. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik analisis deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

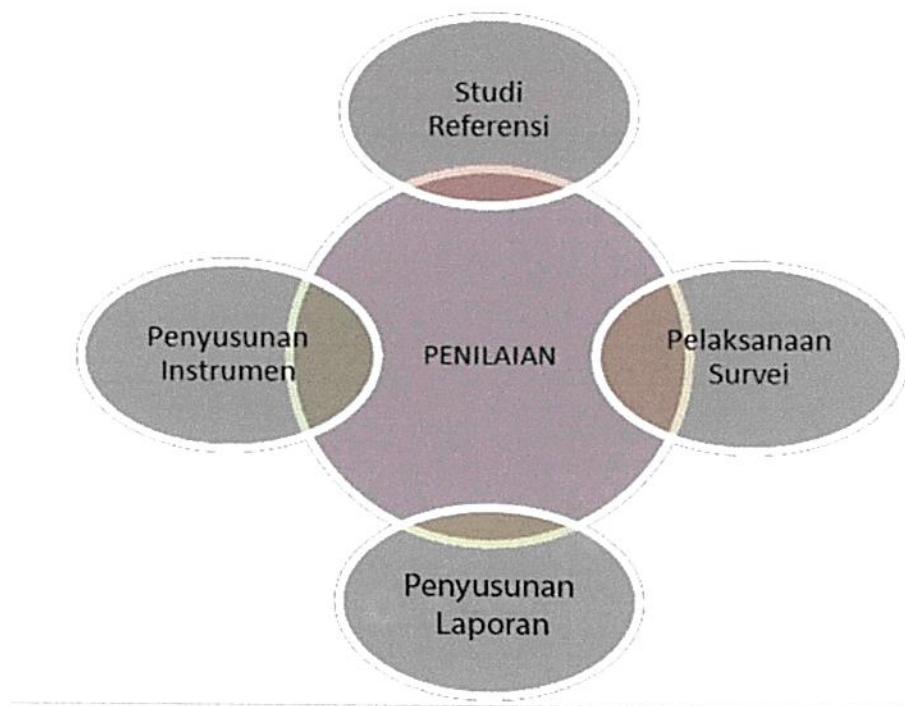
- a. Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.
- b. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.
- c. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 - 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

F. Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Pengadilan Negeri Lahat melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencangkup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun Instrumen Survei;
2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
3. Menetukan responden;
4. Melakukan survei;
5. Menyajikan dan melaporkan hasil;

Gambar 1
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 1
Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 2
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

PERHITUNGAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI

Perhitungan data survei telah dilakukan secara otomatis pada aplikasi survei elektronik (SISUPER). Berikut adalah ada yang telah terkumpul dan diunduh melalui aplikasi SISUPER dengan log in sebagai admin survei Pengadilan Negeri Lahat.

A. Indeks Total

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domicil Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Umur
SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	JUMLAH	105 RESPONDEN			
PENGADILAN NEGERI LAHAT	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 84 ORANG			
		PEREMPUAN : 21 ORANG			
NILAI INDEKS	PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 1 ORG		
3,93 / 98,33 %		SD : 1 ORG	Diploma 3 : 3 ORG		
Periode 1 Januari 2022 sampai 31 Maret 2022		SMP : 7 ORG	S1 : 13 ORG		
		SMU : 79 ORG	S2 : 1 ORG		
	PEKERJAAN	Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 0 ORG		
		PNS : 2 ORG	SWASTA : 24 ORG		
		TNI : 0 ORG	WIRASAHA : 12 ORG		
		POLRI : 9 ORG	TENAGA KONTRAK : 0 ORG		
		LAINNYA : 58 ORG			

Perhitungan indeks persepsi korupsi pada Triwulan I Tahun 2022 dengan jumlah responden 105 orang, diperoleh Nilai indeks 3,93 atau masuk dalam kategori **Bersih dari Korupsi**.

B. Data Umum Responde

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Demografi Responden	Data Umur Responden	Data Lajemar	Nilai Per Unsur										
Show	10	20 entries	Copy	CSV	Excel	PDF	Print	Search							
	Name/Kode Responden	Domicili	Umur/JK	Pendidikan/Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam
1	Jumadi R-056584-IPAK-E50EECE115	SUMATERA SELATAN	50 Tahun Laki-laki	SMU SVASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 Maret 2022
2	Tarmizi R-056584-IPAK-20AC255C5A	SUMATERA SELATAN	46 Tahun Laki-laki	SMU LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	30 Maret 2022
3	Mashuriadi R-056584-IPAK-C5B9272601	SUMATERA SELATAN	35 Tahun Laki-laki	S1 SVASTA	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	30 Maret 2022
4	Jhon Kanedi R-056584-IPAK-88C3A41908	SUMATERA SELATAN	43 Tahun Laki-laki	SMU SVASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 Maret 2022
5	Azzan R-056584-IPAK-085F8A7F90	SUMATERA SELATAN	47 Tahun Laki-laki	Diploma 3 SVASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 Maret 2022
6	Armodi R-056584-IPAK-9BD523816A	SUMATERA SELATAN	42 Tahun Laki-laki	SMU LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	30 Maret 2022
7	Dava Alino R-056584-IPAK-E8D7AF5784	SUMATERA SELATAN	28 Tahun Laki-laki	SMU SVASTA	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	30 Maret 2022
8	Defri R-056584-IPAK-EBB1DC0896	SUMATERA SELATAN	34 Tahun Laki-laki	SMU POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 Maret 2022
9	Alex Stanzeil R-056584-IPAK-FF214D0011	SUMATERA SELATAN	31 Tahun Laki-laki	SMU SVASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 Maret 2022

Data umum responden memuat rekam nama/kode responden, domisili, umur, pendidikan/ pekerjaan, penilaian masing-masing unsur, serta waktu penilaian.

1. Jenis Kelamin

Tabel 3
Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah responden	Persentase
1	Laki-laki	84	80%
2	Perempuan	21	20%
Jumlah		105	100%

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin **Laki-Laki (80%)**.

2. Pendidikan Terakhir

Tabel 4
Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah responden	Persentase
1	SD	1	1%
2	SMP	7	7%
3	SLTA	79	75%
4	DIPLOMA 1	0	0%
5	DIPLOMA 2	1	1%

6	DIPLOMA 3	3	3%
7	Sarjana Strata Satu	13	120%
8	S2	1	1%
9	S3	0	0%
Jumlah		105	100%

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir **SLTA (75%)**.

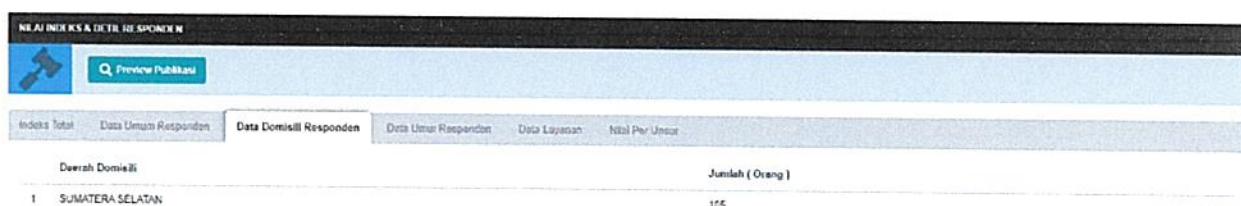
3. Pekerjaan

Tabel 5
Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

No	Pekerjaan Utama	Jumlah responden	Persentase
1	PNS	2	2%
2	TNI	0	0%
3	POLRI	9	9%
4	Swasta	24	23%
5	Wirausaha	12	11%
6	Lainnya	58	55%
Jumlah		105	100%

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini pekerjaan **Lainnya (55%)**.

C. Data Domisili Responden



Berdasarkan hasil rekam data pada aplikasi survei elektronik SISUPER, diketahui bahwa dari 105 orang responden, moyoritas berdomisili di Provinsi Sumatera Selatan.

D. Data Umur Responder

NILAI INDeks & DETIL RESPONDEn			
  Preview Publikasi			
Indeks Total	Data Umur Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden
Deskripsi	Jumlah (Orang)		% (Persen)
18 - 28 Th	28		26,92
29 - 39 Th	38		36,54
40 - 49 Th	25		24,54
50 - 59 Th	13		12,50
60 - 69 Th	0		0,00
Total	104		

Berdasarkan hasil rekam data umur responden pada aplikasi survei elektronik SISUPER, umur/usia responden paling banyak adalah 29 - 39 Tahun sebanyak 36,54 %.

E. Data Layanan

Indeks Total	Data Umur Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur
Layanan				Jumlah (Orang)	
1 Layanan Pidana				13	
2 Layanan Perdata				19	
3 Layanan Hukum / Informasi				65	
4 Layanan Administrasi Umum				8	

Berdasarkan hasil rekam data layanan yang diterima responden pada aplikasi survei elektronik SISUPER, penilaian layanan paling banyak yaitu pada Layanan Kepaniteraan Hukum sebanyak 65 Orang.

F. Nilai Per-Unsur

Indeks Total	Data Umur Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur						
Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Keterangan
Jumlah	420	419	418	414	413	408	409	410	404	415	
NRR Per RL	4,600	3,990	3,561	3,943	3,933	3,866	3,895	3,505	3,848	3,952	39,333
NRR Terimbang	0,400	0,399	0,398	0,394	0,393	0,389	0,390	0,390	0,385	0,395	3,933
IPAK Unit Pelajaran											3,93

Berdasarkan hasil rekam data penilaian masing-masing unsur pada Survei Kepuasan Masyarakat melalui aplikasi survei elektronik SISUPER, maka dapat diketahui nilai dari masing masing ruang lingkup penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Penilaian Masing-Masing Unsur penilaian

No	Ruang Lingkup	Rata-Rata Sekor	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	4,000	Bersih dari Korupsi	1
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,990	Bersih dari Korupsi	2
3	Menjual Pengaruh	4,981	Bersih dari Korupsi	3
4	Transparansi Biaya	3,943	Bersih dari Korupsi	5

6	Biaya Tambahan	3,886	Bersih dari Korupsi	9
7	Hadiah	3,895	Bersih dari Korupsi	8
8	Transparansi Pembayaran	3,905	Bersih dari Korupsi	7
9	Percaloan	3,848	Bersih dari Korupsi	10
10	Perbuatan Curang	3,952	Bersih dari Korupsi	4

BAB IV
HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Hasil olah data survei Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Lahat pada Triwulan I Tahun 2022 yang dilakukan melalui aplikasi survei elektronik SISUPER dengan 105 responden diperoleh nilai indeks sebesar 3,93 dan berada pada kategori "Bersih dari Korupsi" (pada interval 3.26 s/d 4.00).

A. Hasil Penilaian Masing-Masing Ruang Lingkup

Penilaian Indeks Persepsi Korupsi terdiri dari 10 (sepuluh) ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap 10 (sepuluh) ruang lingkup tersebut.

Tabel 7
Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup
Pengukuran Indeks Persepsi Korupsi di Pengadilan Negeri Lahat

No	Ruang Lingkup	Rata-Rata Sekor	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	4,000	Bersih dari Korupsi	1
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,990	Bersih dari Korupsi	2
3	Menjual Pengaruh	4,981	Bersih dari Korupsi	3
4	Transparansi Biaya	3,943	Bersih dari Korupsi	5
5	Transaksi Rahasia	3,933	Bersih dari Korupsi	6
6	Biaya Tambahan	3,886	Bersih dari Korupsi	9
7	Hadiah	3,895	Bersih dari Korupsi	8
8	Transparansi Pembayaran	3,905	Bersih dari Korupsi	7
9	Percaloan	3,848	Bersih dari Korupsi	10
10	Perbuatan Curang	3,952	Bersih dari Korupsi	4

Tabel 8
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Lahat

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4,000. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari manipulasi peraturan.

2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 3,990. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan penyalahgunaan jabatan.

3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,981. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan menjual pengaruh.

4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,943. indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan transparan dalam biaya.

5. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3,933 indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari transaksi rahasia.

6. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,886. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Biaya Tambahan.

7. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,895. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari pemberian hadiah.

8. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transpparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 3,905. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan transparan dalam pembayaran.

9. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini 848menunjukkan hasil pada index 3,848. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan Percaloan.

10. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3,952. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari perbuatan curang.

B. Evaluasi Nilai Unsur

1. Unsur Tertinggi Berdasarkan penilaian masing-masing unsur SPAK, unsur paling tinggi berada pada ruang lingkup " Manipulasi Peraturan ", " Penyalahgunaan Jabatan ", dan " Menjual Pengaruh ".

EVALUASI NILAI UNSUR		
3 Unsur Terendah	3 Unsur Tertinggi	
No.	Unsur	Nilai
1	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ?	420
2	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	419
3	Pernahkah diperlakukan seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	418

2. Unsur Terendah Berdasarkan penilaian masing-masing unsur SPAK, unsur paling rendah berada pada ruang lingkup "Percaloan", "Biaya Tambahan", dan " Hadiah ".

EVALUASI NILAI UNSUR		
3 Unsur Terendah	3 Unsur Tertinggi	
No.	Unsur	Nilai
1	Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktik KKN di Pengadilan ?	404
2	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?	408
3	Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?	409

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lahat Triwulan I Tahun 2022 diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Lahat memiliki indeks Persepsi Korupsi 3,93 atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,000.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,990.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,981.
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,943.
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,933.
6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,886.
7. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,895.
8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,905.
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,848.
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,952.

B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lahat Triwulan I Tahun 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,93 (98,33%) atau masuk pada persepsi BERSIH DARI KORUPSI. Namun dari seputuh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Percaloan memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

LAMPIRAN

**PERHITUNGAN INDEKS SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
TRIWULAN I BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN MARET 2022**

Kode orden	Pelayanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam
Ji	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 30 Maret 2022
zi	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	Rabu, 30 Maret 2022
Jriadi	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	Rabu, 30 Maret 2022
Canedi	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 30 Maret 2022
di	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 30 Maret 2022
Akino	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	Rabu, 30 Maret 2022
itanzerli	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 30 Maret 2022
isuardi	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	Rabu, 30 Maret 2022
Jani	Layanan Administrasi Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 30 Maret 2022
DIN	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 30 Maret 2022
ano	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 30 Maret 2022
Dedi	Layanan Administrasi Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 30 Maret 2022
Afrianto	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 30 Maret 2022
HANDAYANI	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	Rabu, 30 Maret 2022
min	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	Rabu, 30 Maret 2022
Najamudin	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	Rabu, 30 Maret 2022
Terawan	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 30 Maret 2022
zin	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	Rabu, 30 Maret 2022
ul Rasyid	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 30 Maret 2022

Jaya	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 30 Maret 2022
HARTAWAN	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 30 Maret 2022
	Layanan Administrasi Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 30 Maret 2022
	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	3	3	Rabu, 30 Maret 2022
MAT MARTIANSYAH	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 30 Maret 2022
NI	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 30 Maret 2022
RATNA SARI	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 30 Maret 2022
VINDA	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 30 Maret 2022
W APRILANI	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 30 Maret 2022
INI	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 30 Maret 2022
van S.H	Layanan Administrasi Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 30 Maret 2022
Saroni	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	3	3	Rabu, 30 Maret 2022
adi	Layanan Hukum / Informasi	4	4	3	3	3	3	3	3	Selasa, 29 Maret 2022
Pebriansyah	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Maret 2022
i	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Maret 2022
	Layanan Administrasi Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Maret 2022
Islamah	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Maret 2022
	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Maret 2022
d Ramadhani	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Maret 2022
	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Maret 2022
IUSLIMAH	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Maret 2022
APUTRA	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Maret 2022
wan	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Maret 2022
m	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Maret 2022
anjaya	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Maret 2022
an	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Maret 2022
Mahal	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Maret 2022
i	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Maret 2022
ido Saputra	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Maret 2022
ii	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Maret 2022
	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Maret 2022
ner	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Maret 2022
van	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	3	3	Selasa, 29 Maret 2022
	Layanan Pidana	4	4	1	4	4	4	4	4	Senin, 28 Maret 2022
	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	3	4	4	Senin, 28 Maret 2022
Mahendra	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	Senin, 28 Maret 2022
ansyah	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	3	3	4	Senin, 28 Maret 2022

n Lori	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	Senin, 28 Maret 2022
n Yuliandi	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	Senin, 28 Maret 2022
ian Heriayanto	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Senin, 28 Maret 2022
Pita Wulansari	Layanan Hukum / Informasi	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	Senin, 28 Maret 2022
nto Hervita Dewi	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	Senin, 28 Maret 2022
n an Saibadi	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	Senin, 28 Maret 2022
din an Saibani	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Senin, 28 Maret 2022
h eranita	Layanan Administrasi Umum	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	Senin, 28 Maret 2022
uliana Saputra	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Senin, 28 Maret 2022
jm litan Deki	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Jumat, 25 Maret 2022
syah di	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Jumat, 25 Maret 2022
sopran Andika Seksi	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Jumat, 25 Maret 2022
Nulandari	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Jumat, 25 Maret 2022
iprisal Saputra	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kamis, 10 Maret 2022
rwanto	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kamis, 10 Maret 2022
an Negara	Layanan Hukum / Informasi	4	4	2	4	1	1	4	4	4	4	Senin, 17 Januari 2022
an Sharipudin	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	Selasa, 11 Januari 2022
Marlian Sirait	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	Selasa, 11 Januari 2022
Iariani	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	Rabu, 5 Januari 2022
Marta Ramadansya	Layanan Hukum / Informasi	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 5 Januari 2022
a	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	1	4	1	4	4	4	Rabu, 5 Januari 2022

EY PELAYANAN ELEKTRONIK

AL BADAN PERADILAN UMUM

Perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi

Beranda Perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi Detail

Perhitungan Indeks Survey Persepsi Anti Korupsi

Register ini berisi perhitungan survey indeks persepsi anti korupsi oleh para pejabat keadilan / informasi terhadap beberapa point ukur zona integritas pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Keterangan	=	Ruang Lingkup Pelayanan
RL	=	Nilai rata-rata
NRR	=	Indeks Persepsi Anti Korupsi
IPAK	=	Jml nilai per ruang lingkup / jml kuesioner
NRR per RL	=	NRR per ruang lingkup x (1/10)
NRR tertimbang	=	

	Bobot IPAK	Bobot NRR	Bobot RL	Bobot NRR Tertimbang
1	Sangat Baik	31,26 - 100,00		
2	Baik	62,51 - 81,25		
3	Kurang Baik	43,76 - 62,50		
4	Tidak Baik	25,00 - 43,75		
				1,00 - 1,75

Pilih Satuan Kerja ▾ Perioda Triwulan *

Pilih Periode ▾

Templikan Data

NILAI INDEKS DETIL RESPONDEN



Preview Publikasi

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Ursur										
					U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Keterangan
Desripsi															
Jumlah	420	419	418	414	413	408	409	410	404	415					
NRR Per RL	4.000	3.990	3.981	3.943	3.933	3.886	3.895	3.905	3.848	3.952	39.333				
NRR Terimbang	0,400	0,399	0,398	0,394	0,393	0,389	0,390	0,390	0,385	0,395	3,933				
IPAK Unit Pelayanan											3,93				

Y PELAYANAN ELEKTRONIK

BADAN PERADILAN UMUM

Register ini berisi perhitungan survey indeks persepsi anti korupsi oleh para pencari keadilan / informasi terhadap beberapa point untuk ukur zona integritas pada Direktorat Jenderal Peradilan Umum

X

Katakanan	=	Ruang Lingkup Pelayanan
RL	=	Nilai rata-rata
NRR	=	Indeks Persepsi Anti Korupsi
IPAK	=	Jml nilai per ruang lingkup / Jml Kuesioner
NRR per RL	=	NRR per ruang lingkup x (1:10)
NRR tertimbang	=	

Bobot IPAK :

1	Sangat Baik	81,26 - 100,00
2	Baik	62,51 - 81,25
3	Kurang Baik	43,76 - 62,50
4	Tidak Baik	25,00 - 43,75

Pilih Satuan Kerja

Perioda Triwulan

Pilih periode

2022

Tampilkan Data

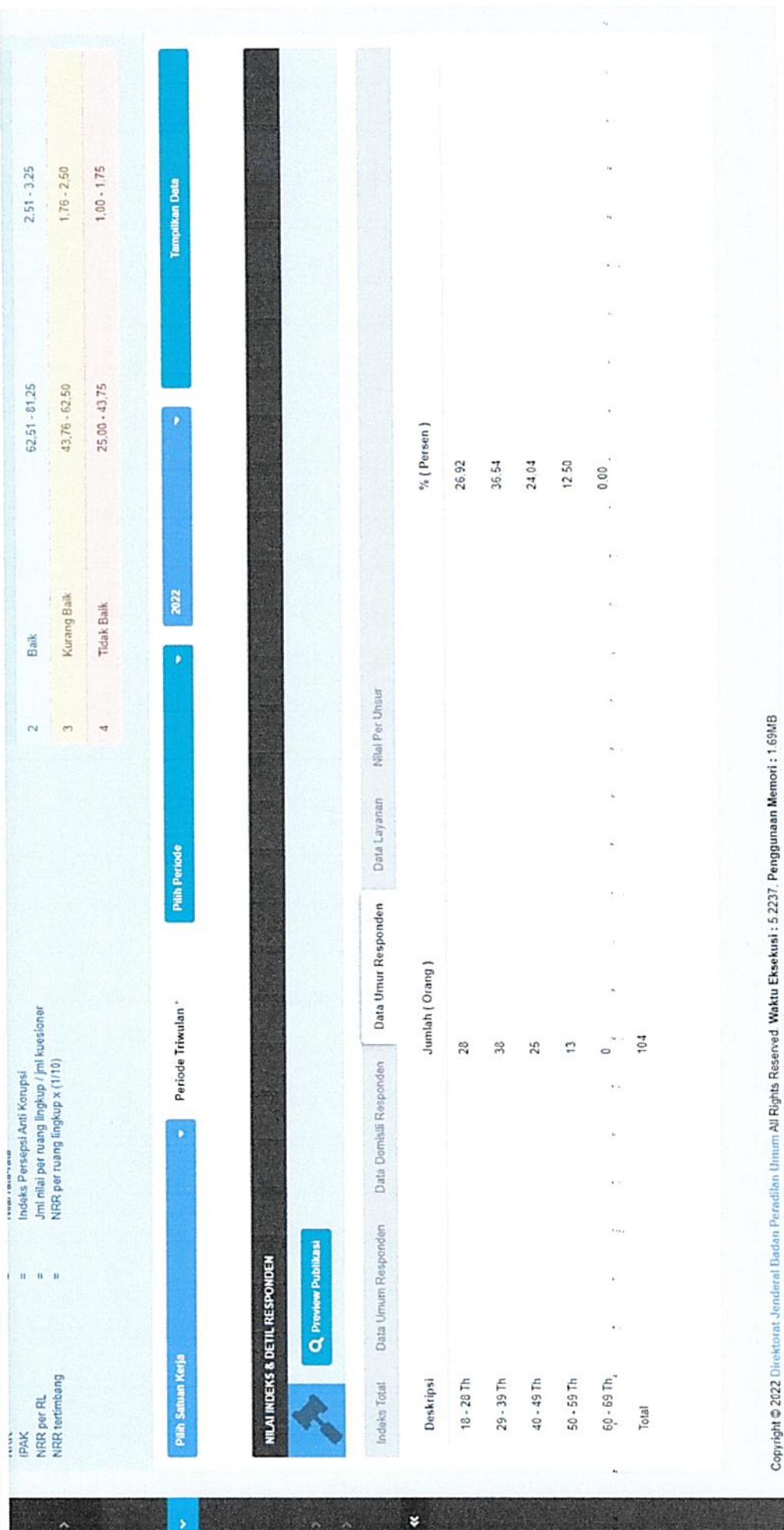
NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN

Q Preview Publikasi

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Demikian Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Jumlah (Orang)
1	Layanan Pidana				13
2	Layanan Perdata				19
3	Layanan Hukum / Informasi				65
4	Layanan Administrasi Umum				8

Copyright © 2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum All Rights Reserved Waktu Eksekusi : 5 2237. Penggunaan Memori : 1.65MB

EY PELAYANAN ELEKTRONIK AL BADAN PERADILAN UMUM



Y PELAYANAN ELEKTRONIK

AL BADAN PERADILAN UMUM

Perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi

Ditil

Perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi

Beranda

X

Detil

Perhitungan Indeks Survey Persepsi Anti Korupsi

Register ini berisi perhitungan survey indeks persepsi anti korupsi oleh para pencari keadilan / informasi terhadap beberapa point tick ukur zona integritas pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Keterangan :	=	Ruang Lingkup Pelayanan
NRR	=	Nilai rata-rata
IPAK	=	Indeks Persepsi Anti Korupsi
NRR per RL	=	Jml nilai per ruang lingkup / jml kuesioner
NRR terlimbang	=	NRR per ruang lingkup x (1/10)

Bobot IPAK :

1	Sangat Baik	81,26 - 100,00
2	Baik	62,51 - 81,25
3	Kurang Baik	43,76 - 62,50
4	Tidak Baik	25,00 - 43,75

Pilih Satuan Kerja

Perioda Triwulan *

Pilih Periode

Templat Data

NILAI INDIKS & DETIL RESPONDEN



Preview Publikasi

Indeks Total	Data Umur Responden	Data Domisili Responden	Data Lajanan	Nilai Per Lintas
Daerah Domisili				Jumlah (Orang)

1 SUMATERA SELATAN

105

EY PELAYANAN ELEKTRONIK AL BADAN PERADILAN UMUM

Pilih Satuan Kerja

Periode Triwulan

2022

Pilih periode

Tampilkan Data

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN



Q Preview Publikasi

Indeks Total Data Umum Responden Data Domisili Responden Data Utur Responden Data Layanan Nilai Per Unsur

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI LAHAT

NILAI INDEKS

3,93 / 98,33 %

Periode 1 Januari 2022 sampai 31 Maret 2022

JUMLAH	105 RESPONDEN
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 84 ORANG
PENDIDIKAN	PEREMPUAN : 21 ORANG
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG
SD : 1 ORG	Diploma 2 : 1 ORG
SMP : 7 ORG	Diploma 3 : 3 ORG
SMU : 79 ORG	S1 : 13 ORG
Diploma 1 : 0 ORG	S2 : 1 ORG
PNS : 2 ORG	S3 : 0 ORG
TNI : 0 ORG	SWASTA : 24 ORG
POLRI : 9 ORG	WIRUSAHA : 12 ORG
LAINNYA : 58 ORG	TENAGA KONTRAK : 0 ORG